

MEMBANGUN KURIKULUM SENDIRI

Oleh R Wakhid Akhdinirwanto

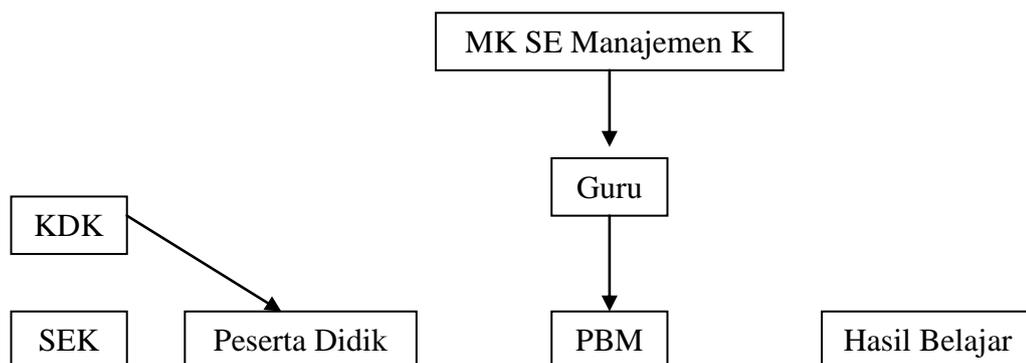
Ada rencana menarik dari Pemkab Bantul DIY, yaitu ingin membangun kurikulum sendiri. Rencana ini mengemuka setelah Pemkab Bantul sukses menyekolahkan guru-gurunya ke jenjang S2. Dari 800 guru yang ada di Kabupaten Bantul, 287 guru di antaranya sudah lulus S2. Tujuan pembuatan kurikulum sendiri tersebut menurut Bupati Bantul, Drs HM Idham Samawi, dimaksudkan untuk menjadikan generasi muda yang berkualitas guna menunjang pembangunan Kabupaten Bantul. Kalau diperbolehkan oleh depdiknas pusat, kurikulum pendidikan karya Kabupaten Bantul ini kemungkinan baru akan dilaksanakan pada tahun 2006 mendatang (KR, 1/9/2003).

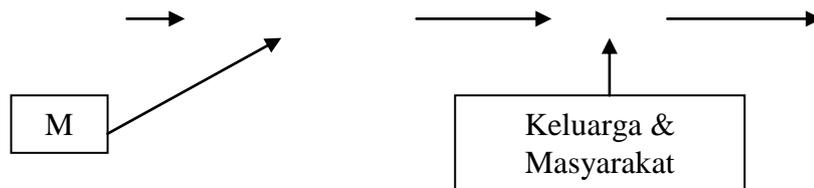
Langkah Kabupaten Bantul ini patut kita cermati. Sebab meski langkah itu baru dalam taraf rencana, tetapi mengandung makna yang dalam bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di era desentralisasi pendidikan seperti sekarang ini.

Dalam perspektif desentralisasi, arah kebijakan pembangunan pendidikan yang relevan adalah demokratisasi pendidikan. Padahal demokratisasi pendidikan bisa terjadi jika ada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud bukan dalam arti sempit seperti yang selama ini kita kenal yaitu dalam hal pembiayaan pendidikan, rapat-rapat komite sekolah untuk memutuskan pembangunan sekolah dan besarnya tarikan atau iuran siswa, dan sebagainya. Melainkan dalam arti seluas-luasnya seperti ikut serta menentukan arah dan kebijakan, merumuskan strategi, sasaran dan tujuan pendidikan, terlibat aktif dalam implementasi, dan yang lebih penting lagi menentukan kurikulum pendidikan.

Mengapa partisipasi masyarakat dalam menentukan kurikulum penting? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peserta didik dan tenaga kependidikan (guru) dalam interaksi proses belajar mengajar (PBM) dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi (SEK), kemampuan dasar kognitif (KDK), dan motivasi (M). Kemudian kurikulum dalam hal ini meliputi materi kurikulum (MK), proses belajar mengajar (PBM), sistem evaluasi (SE), dan manajemen kurikulum adalah unsur dalam sistem persekolahan. Dan terakhir lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat adalah pemberi suasana dan dukungan atau sebaliknya (lihat skema).

Skema faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan





Dari skema di atas tampak bahwa PBM sangat dipengaruhi oleh guru, kurikulum, lingkungan keluarga dan masyarakat. Kalau guru sudah ditingkatkan kualitasnya misalnya dengan menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi, lantas faktor apa lagi yang harus tinjau? Memang secara empiris lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh dalam PBM di sekolah. Namun apa yang dapat dilakukan lembaga sekolah (Depdiknas) untuk menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat untuk mendukungnya. Karena ketidakmungkinan Depdiknas untuk mempengaruhi lingkungan secara langsung, maka jalan yang dapat ditempuh hanyalah memperkuat pengaruh pendidikan sekolah. Padahal unsur terpenting dalam pendidikan sekolah adalah kurikulum. Dengan demikian kurikulum ini satu-satunya unsur sistem pendidikan yang dapat direncanakan dan dikendalikan setelah kualitas guru diperbaiki, kalau kita ingin menyiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan, rasa tanggung jawab, dan kepribadian untuk menghadapi tuntutan era perdagangan bebas. Suatu era yang menurut Rostow menuntut perubahan sikap.

Memang pemerintah pusat telah mengantisipasinya dengan melakukan revisi kurikulum 1994 melalui suplemen-suplemen kurikulum 1994. Itu terjadi setelah kurikulum tersebut banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak, ada yang mengatakan perlu dirampingkan, diesklarasikan, bahkan ada pula yang mengatakan harus dibedah total. Setelah itu Depdiknas mengambil jalan tengah dengan menambah suplemen untuk kurikulum 1994 sambil menunggu kurikulum baru yang dirancang memiliki semangat desentralisasi pendidikan.

Saat ini sedang disosialisasikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang segera diterapkan sebagai pengganti kurikulum 1994. Isu yang muncul dari KBK adalah lebih mengedepankan *competency standard oriented*, lebih berorientasi kepada kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa untuk dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dari materi standar. Kemampuan ini harus dikembangkan pada setiap tingkat dan jenjang tertentu (Puskur, 2001). Namun saat ini juga muncul “penentang-penentang” KBK yang dikomandani Prof Wayan Degeng cs dari Universitas Negeri Malang (UM). Kelompok ini mengatakan bahwa sesungguhnya KBK itu sudah diterapkan sejak kurikulum 1975 (Radar Malang, 1/9/2003).

Oleh karena itu, jika kita tetap menggunakan KBK seperti yang disosialisasikan di sekolah-sekolah berarti sama saja tidak ada perubahan. Apalagi KBK ini masih memuat kurikulum nasional (kurnas) yang sifatnya seragam dan harus diberikan kepada semua sekolah di Indonesia, sehingga sifat luwes kurikulum sebagai salah satu ciri desentralisasi menjadi hilang. Inilah kelemahan KBK.

Kelemahan lain yang sering muncul dari penyeragaman ini adalah jika ada sekolah yang sukses menerapkan KBK, para pengambil kebijakan pendidikan cenderung bicara keunggulan sekolah tersebut kemudian diiming-imingkan kepada sekolah lain agar mencotohnya. Celakanya, kita mudah sekali meniru

perilaku orang lain. Di bidang pertanian misalnya, ketika orang lain sukses menanam bayam cabut dan menghasilkan banyak uang, maka kita beramai-ramai membudidayakan bayam jenis tersebut dengan harapan hasilnya melimpah dan kemudian banyak uang. Namun apa yang terjadi? Di balik melimpahnya bayam cabut tersebut tidak diikuti dengan melimpahnya uang. Mengapa? Sebab harganya turun drastis. Bahkan yang terjadi justru kelebihan produksi sehingga biaya produksi lebih besar katimbang hasil panennya. Akibatnya bukan untung yang diperoleh tapi sebaliknya, kerugian menimpa para petani bayam cabut tersebut. Demikian juga ketika masyarakat Sleman DIY sukses membudidayakan salak pondoh dan harganya menggiurkan, maka orang lain pun beramai-ramai menirunya. Namun ketika salak pondoh sudah tersebar ke mana-mana, harganya justru turun drastis. Kerugian demi kerugian menimpa para petani.

Kecenderungan yang sama tampaknya juga terjadi di dunia pendidikan. Kita berusaha meniru sekolah tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Akibat meniru tersebut, sejumlah sekolah menghasilkan *output* yang sama keunggulannya, misalnya unggul di bidang olahraga, kerajinan, nelayan, pertanian, atau bahkan juga unggul dalam bidang intelektual sehingga mampu memasok siswanya ke sejumlah PTN/PTS favorit. Akibatnya suatu saat kita kelebihan semuanya, sehingga yang terjadi yang semula barang langka, dicari dan dibutuhkan banyak orang, menjadi hal yang biasa bahkan tidak berharga sama sekali karena kelebihan *output*-nya.

Sesungguhnya mencontoh atau meniru itu wajar dan sah-sah saja. Namun yang seharusnya lebih ditekankan adalah inovasi setelah mencontoh, bukannya sama persis dengan yang dicontohnya. Kelemahan kurikulum pendidikan yang seragam secara nasional salah satunya karena mudah dicontoh sehingga bisa diterapkan di mana-mana. Kalaupun ada beberapa ciri khas daerah, biasanya masuk pada muatan lokal (mulok). Itu sudah dianggap mencerminkan desentralisasi pendidikan. Celaknya mulok yang saat ini ada justru seragam. Lihat saja mulok SD yang sebagian besar memasukkan bahasa Inggris sebagai mulok. Di mana semangat desentralisasi? Akibatnya, *output* pendidikan cepat jenuh sehingga yang terjadi adalah munculnya tenaga-tenaga kerja murah atau bahkan meledaknya jumlah pengangguran.

Karena itu dengan membangun kurikulum sendiri sesungguhnya akan menambah keanekaragaman *output* pendidikan. Mengapa? Sebab kurikulum pendidikan tersebut akan dibuat sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Sementara kita tahu kondisi daerah di Indonesia beraneka ragam yang sekaligus menunjukkan kekayaan alam kita. Kalau ini digarap dengan kurikulum pendidikan yang dibuat daerah tentu akan menghasilkan *output* pendidikan yang beraneka ragam dengan kualitasnya masing-masing. Kalaupun ada yang ingin menirunya sudah pasti tidak akan sama persis dengan yang ditiru sebab masing-masing daerah kondisinya tak sama, sehingga untuk meniru diperlukan inovasi-inovasi tertentu. Oleh karena itu niat baik seperti Pemkab Bantul DIY membuat kurikulum sendiri harus kita dukung guna memberikan pencerahan di bidang pendidikan. Ini dimaksudkan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas sekaligus bervariasi.

Wates, 19 April 2004
Penulis

Drs. R Wakhid Akhdinirwanto, Msi

Daftar Pustaka

Puskur. 2001. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Nasional*. Jakarta:
Depdiknas

Ace Suryadi & Tilaar, H.A.R. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung:
Remaja Rosdakarya.

Soedijarto. 1993. *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia.

Penulis: dosen Universitas Negeri Malang

Alamat Rumah: Wonoisidi Kidul RT 73 RW 32 Wates, Kulonprogo, 55611

Keterangan:

Dimuat Majalah WARTA GURU Penerbit Dinas Pendidikan Propinsi DIY, Volume VIII, No 2

Juli 2004